

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Malang Tahun 2021 – 2023

Anastasya Amara Salsabila¹, Sonny Fransisco Siboro², Yunita Tri Damayanti³,
Fitrah Sarah Maryanti⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail: 63210221@bsi.ac.id¹, sonny.sof@bsi.ac.id², 63210265@bsi.ac.id³, 63210113@bsi.ac.id⁴

Abstract. This study analyzes the Regional Revenue of the Malang City Government for the 2021-2023 Fiscal Year based on the Budget Realization Report. This research uses quantitative description analysis with the concept of financial ratio calculation. Secondary data from the official website of the Malang City Government, <https://malangkota.go.id>, is used to calculate these financial ratios. The method is carried out by considering the performance indicators of regional financial management of the Malang City Government using five indicators: 1) Revenue Budget Variance Analysis 2) Financial Ratio Analysis of Degree of Decentralization 3) Regional Financial Dependency Ratio 4) Effectiveness Ratio 5) Efficiency Ratio. The results of this study are the Malang City Government is increasingly decentralizing decisions and authority to lower levels. Regional dependence on external assistance is decreasing. There is a change in performance. And the Malang City Government needs efforts to minimize waste, maximize the use of money, and improve organizational efficiency to achieve the desired results.

Keywords: Financial ratio, decentralized ratio, dependency ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio.

Abstrak. Studi ini menganalisis Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2021–2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi kuantitatif dengan konsep perhitungan rasio keuangan. Data sekunder dari situs web resmi Pemerintah Kota Malang yaitu <https://malangkota.go.id> digunakan untuk menghitung rasio keuangan ini. Metode yang dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan lima indikator: 1) Analisis Varians Anggaran Pendapatan 2) Analisis Rasio Keuangan Derajat Desentralisasi 3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 4) Rasio Efektivitas 5) Rasio Efisiensi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Malang semakin melakukan desentralisasi keputusan dan wewenang ke tingkat yang lebih rendah. Ketergantungan daerah pada bantuan luar semakin menurun. Adanya perubahan dalam kinerja. Dan Pemerintah Kota Malang perlu upaya untuk meminimalkan pemborosan, memaksimalkan penggunaan uang, serta meningkatkan efisiensi organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kata kunci: Rasio keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

LATAR BELAKANG

Akuntansi sektor publik telah berkembang dengan cepat. Praktik akuntansi pada instansi pemerintah, perusahaan nasional (negara) dan daerah, serta perusahaan publik lainnya, saat ini mendapat perhatian lebih dibandingkan sebelumnya. Semakin banyak orang yang menuntut agar lembaga publik menjadi lebih transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah semakin berkonsentrasi pada mengevaluasi seberapa efektif praktik administrasi pemerintahan. Ini termasuk sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan dan pengembangan keuangan, sistem pemantauan dan pemeriksaan, dan efek keuangan dari keputusan pemerintah.

Jika dicermati, lebih dekat, akuntansi sektor publik memainkan peran penting dan menjadi topik perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik. Kemudian disebut akuntansi sektor publik, yang merupakan mekanisme akuntansi dan audit yang dilakukan oleh pengelolaan dana publik. Masyarakat, bukan individu, memiliki aset publik. Organisasi sektor publik atau hubungan sektor swasta umumnya menyelenggarakan atau melaksanakan dana ini. Definisi akuntansi sektor publik di Indonesia adalah analisis dan akuntansi pengelolaan keuangan organisasi pemerintah sub negara, lembaga tinggi dan departemen negara, lembaga hukum negara, organisasi pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik daerah, dan juga negara institusi. Ini tidak termasuk masyarakat, lembaga sosial, dan lembaga sosial di institusi tersebut, dan juga dalam merencanakan proyek kolaboratif antara organisasi swasta dan publik.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

Pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan adalah bagian dari akuntansi. Akuntansi digunakan untuk membantu pemangku kepentingan seperti manajemen, pemilik, investor, dan pihak eksternal lainnya membuat keputusan yang tepat. (Erik Setiawan, 2021) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan data yang dilakukan oleh lembaga tertentu dan digunakan untuk membuat laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis. Menurut (Baviga, 2022), pengetahuan akuntansi adalah pemahaman yang tepat tentang apa yang dianggap sebagai fakta, kebenaran, atau informasi tentang proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi sektor publik merupakan bidang akuntansi yang fokus pada entitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan atau sektor publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan tentang organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang didanai pemerintah. Menurut (Sitepu et al., 2024), Akuntansi sektor publik adalah cabang ilmu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan organisasi sektor publik, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, otoritas, kementerian, lembaga, organisasi nirlaba, dan lain-lain. Berbagai peran akuntansi sektor publik termasuk memberikan informasi keuangan yang akurat, meningkatkan transparansi pemerintah, dan menilai kinerja pemerintah.

Anggaran Sektor Publik

Salah satu cara untuk mengembangkan daerah adalah dengan menyusun anggaran yang baik, menurut Widowati dan Fatimah (2022) dalam jurnal (Rahmawati & Susanto, 2023), sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Anggaran adalah susunan yang tertulis tentang kegiatan organisasi. Anggaran sangat penting sebagai rencana keuangan yang disusun dengan baik untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi atau programnya. Pernyataan Nomor 2 Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode." (Fredrik Tuju et al., 2022). Anggaran berasal dari kata "budget" (Inggris), yang sebelumnya berasal dari "bougette" (Perancis), yang berarti "sebuah tas kecil". Anggaran dalam arti luas mencakup waktu yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit mencakup rencana untuk menerima dan membelanjakan uang selama satu tahun (Madjid, 2019). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah perkiraan atau estimasi jumlah uang yang dibayarkan dan diterima dalam jangka waktu tertentu, seperti bulanan atau tahunan.

Anggaran sektor publik adalah suatu pengeluaran yang direncanakan untuk program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, serta pendapatan yang diharapkan dari pajak dan sumber pendapatan lainnya selama periode fiskal tertentu. Anggaran sektor publik, menurut (Ani et al., 2020), adalah suatu rencana operasi yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan dan berisi informasi tentang pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan. (MRizky, 2020) mengatakan bahwa, penganggaran sektor publik melibatkan proses menentukan alokasi dana untuk program dan aktivitas dalam nilai moneter. Proses ini dimulai dengan tahap perumusan strategi dan perencanaan strategis, yang sangat penting karena anggaran yang tidak efisien dan tidak berfokus pada kinerja dapat menghambat rencana yang telah ditetapkan.

Anggaran sektor publik dirancang untuk mengatur pengeluaran pemerintah sesuai dengan sumber daya dan kebutuhan, serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Menurut (Ani et al., 2020), anggaran sektor publik sangat penting. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya, kebutuhan dan keperluan masyarakat tidak terbatas, bahkan berkembang, dan sumber daya

terbatas, sehingga anggaran sangat diperlukan, dan untuk mengarahkan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Analisis Rasio Keuangan Sektor Publik

Analisis rasio keuangan sektor publik adalah suatu proses analisis dengan menggunakan berbagai metrik dan rasio untuk menilai keuangan entitas publik seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Analisis rasio keuangan sektor publik membantu pembuat kebijakan, auditor, dan masyarakat umum memahami kinerja keuangan entitas publik, menemukan risiko, dan membantu mereka membuat keputusan lebih baik tentang manajemen keuangan dan perencanaan anggaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan manajemen keuangan. Menurut (MRizky, 2020), analisis rasio keuangan sektor publik adalah cara untuk menilai kinerja keuangan badan publik seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, atau badan publik lainnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sektor Publik

Menurut (Ruliaty et al., 2019), laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam pemenuhan kebutuhan bersama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu persyaratan untuk penyajian laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 pada pasal 1 ayat 19 dalam jurnal penelitian (Agustin et al., 2024), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, realisasi pembiayaan, dan perbandingan saldo dana anggaran. Laporan Realisasi Anggaran berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mengevaluasi kinerja program, menyediakan data untuk perencanaan anggaran berikutnya, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik bagi sektor publik. Menurut (Lasupu et al., 2021), Laporan realisasi anggaran juga dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat.
- b. Telah dilakukan dengan cara yang sesuai dalam anggaran APBN/APBD.
- c. Telah dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Laporan realisasi anggaran pendapatan daerah kota Malang menyajikan data yang berharga untuk dianalisis guna memahami bagaimana alokasi anggaran dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan daerah. Jurnal ini berusaha untuk memberikan analisis dalam mengenai struktur anggaran, prioritas pengeluaran serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, analisis laporan realisasi anggaran merupakan aspek penting yang mencerminkan transparansi

pemerintah daerah dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Salah satu kota berkembang di Indonesia, Kota Malang, perlu memantau secara ketat aliran pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan setiap dana yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Malang Tahun 2021-2023 harus dianalisis, itulah tujuan jurnal ini. Dengan menekankan pada identifikasi, evaluasi, dan memberikan efektivitas menggunakan anggaran dalam mendukung program pembangunan daerah. Melalui analisis yang komprehensif diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kinerja anggaran daerah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran masa depan. Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi analisis ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Malang dalam menyusun APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Diharapkan juga bahwa jurnal ini akan bermanfaat bagi peneliti, akademisi, dan praktisi keuangan publik yang ingin mempelajari daerah di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya berperan sebagai dokumen akademis tetapi juga sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama – sama membangun kota Malang.

METODE PENELITIAN

Analisis deskripsi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode perhitungan rasio keuangan digunakan. Dengan kata lain, kami menghitung rasio keuangan dari pos realisasi anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun 2021-2023. Data sekunder yang digunakan untuk perhitungan rasio keuangan ini berasal dari situs web resmi Pemerintah Kota Malang yaitu <https://malangkota.go.id>. Serta buku referensi dan jurnal. Metode yang dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Malang dengan menggunakan lima indikator:

1. Analisis Varian (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis ini menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tanpa melebihi anggaran (Shaladin Hernandi et al., 2022). Perumusan:

Analisis Varian pendapatan	Total Realisasi Pendapatan	100%
	Total Anggaran Pendapatan	

2. Analisis Rasio Keuangan mengenai Tingkat Desentralisasi

Untuk mengetahui rasio keuangan derajat desentralisasi, harus membandingkan total pendapatan daerah dengan pendapatan asli daerah. Kapasitas pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi sebanding dengan porsi PAD. Berikut adalah rumus

hubungan ini:

Derajat Desentralisasi	Realisasi PAD	100%
	Total Realisasi Pend.Daerah	

Tabel 1. Presentase Derajat Desentralisasi (%)

Presentase Tingkat Desentralisasi (%)	Tingkat Desentralisasi
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Baik
lebih dari 50,00	Sangat Baik

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Faktor ini menunjukkan betapa bergantungnya seseorang pada kontribusi pemerintah, provinsi, dan kabupaten nasional. Dana alokasi umum dan dana perimbangan, misalnya, biasanya menjadi sumber pendapatan transfer, yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian lokal. Untuk menghitung faktor ini, pendapatan transfer dibandingkan dengan pendapatan total daerah (Bulo & Deviyanti, 2020). Perumusan:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Pendapatan Transfer	100%
	Total Pendapatan Daerah	

Tabel 2. Presentase Ketergantungan Keuangan Daerah (%)

Persentase Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
lebih dari 50,00	Sangat Tinggi

4. Rasio Efektivitas

Hubungan antara keluaran, tujuan dan sasaran yang dapat dicapai disebut efektif. Pada dasarnya, efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran politik. Menurut (Arini & Erliana, 2023), suatu wilayah/daerah dapat dianggap efektif dalam kemampuan keuangannya jika dapat mencapai tingkat rasio efektivitas 100%. Perumusan:

Rasio Efektivitas	Realisasi Penerimaan Pend.Asli Daerah	100%
	Target Penerimaan PAD	

Tabel 3. Presentase Ratio Efektivitas (%)

Presentase Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Rasio Efektivitas
Lebih dari 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Kurang dari 75	Tidak Efektif

5. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui seberapa efisien, seseorang dapat membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, atau biaya output. Menurut (Amanda Program Studi D- et al., 2021), jika rasio kurang dari 100%, itu dianggap sebagai kinerja pemerintah daerah yang efisien. Semakin rendah rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Perumusan:

Rasio Efisiensi	Jumlah Realisasi Belanja Daerah	100%
	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah	

Tabel 4. Presentase Rasio Efisien (%)

Presentase Rasio Efisiensi (%)	Kriteria Rasio Efisiensi
< 100	Efisiensi
= 100	Efisiensi seimbang
> 100	Tidak Efisiensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Varian (Selisih) Pendapatan

Kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan tetapi tidak melebihi anggaran dikenal sebagai analisis varian (selisih) pendapatan (Shaladin Hernandi et al., 2022). Hasil perhitungan varian pendapatan kota Malang tahun 2021-2023:

Tabel 1 menggambarkan jumlah pendapatan Kota Malang pada tahun 2021 turun sebesar Rp. 148.582.371.535,87, atau 107%, pada tahun 2022 turun sebesar -Rp. 103.087.121,60, atau 105%, dan pada tahun 2023 turun sebesar Rp. 33.073.309.427,19, atau 99%. Hasil analisis varian (selisih) pendapatan Kota Malang pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan Kota Malang memiliki selisih bersaldo negatif.

Tabel 5. Perhitungan Varian Pendapatan Daerah untuk Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varian (Selisih)	Presentase
2021	Rp 2.003.773.466.717,00	Rp 2.152.355.838.252,87	-Rp 148.582.371.535,87	107%
2022	Rp 2.068.666.283.032,00	Rp 2.171.753.404.373,60	-Rp 103.087.121.341,60	105%
2023	Rp 2.377.889.254.705,00	Rp 2.344.815.945.277,81	Rp 33.073.309.427,19	99%

Analisis Derajat Rasio Keuangan: Derajat Desentralisasi

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa tingkat derajat desentralisasi Kota Malang pada tahun 2021-2023 terus meningkat dan juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2021, tingkat derajat desentralisasi adalah sebesar 28,05%, yang kemudian meningkat menjadi 33,08% pada tahun 2022, dan 33,78% pada tahun 2023.

Tabel 6. Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kota Malang untuk Tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi PAD	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2021	Rp 603.794.666.883,32	Rp 2.152.355.838.252,87	28,05%
2022	Rp 718.337.240.633,10	Rp 2.171.753.404.373,60	33,08%
2023	Rp 792.120.013.218,17	Rp 2.344.815.945.277,81	33,78%

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang semakin melakukan desentralisasi keputusan dan wewenang ke tingkat yang lebih rendah selama periode tersebut. Peningkatan dapat menunjukkan sejumlah hal-hal, seperti:

- Pertumbuhan pemerintah daerah:** Meningkatnya derajat desentralisasi menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang telah meningkatkan otoritas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Lembaga dan unit daerah dalam pengambilan keputusan. Hal ini, dapat mencakup pengelolaan anggaran, layanan publik, atau pembangunan infrastruktur di tingkat daerah.
- Otonomi daerah:** Peningkatan derajat desentralisasi juga mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan otonomi daerah dalam pengelolaan urusan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi pemerintahan, yang menekankan pada pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tanggap terhadap kebutuhan dan kekhususan komunitas lokal.
- Pengelolaan keuangan daerah:** Dengan semakin meningkatnya desentralisasi,

Pemerintah Kota Malang harus memastikan pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik dan efisien. Hal ini mencakup pengendalian ketat terhadap belanja dan pendapatan daerah serta upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

- d. **Partisipasi masyarakat:** Desentralisasi yang lebih besar dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program yang dibuat.

Penting untuk terus memantau dampak dari meningkatnya desentralisasi ini baik dalam hal efektivitas pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi yang lebih luas membawa manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan keberhasilan Kota Malang.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 7, dari data yang diolah. Rasio ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah Kota Malang terus berkurang antara tahun 2021-2023 dari 68,55% menjadi 66,22%. Pada tahun 2021 presentase rasio ketergantungan keuangan sebesar 68,55%, pada tahun 2022, sebesar 66,78%, dan pada tahun 2023 sebesar 66,22%.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2021	Rp 1.475.415.827.616,00	Rp 2.152.355.838.252,87	68,55%
2022	Rp 1.450.405.048.247,00	Rp 2.171.753.404.373,60	66,78%
2023	Rp 1.552.647.976.062,00	Rp 2.344.815.945.277,81	66,22%

Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Malang antara tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 98,33% menjadi 79,07% yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam operasi (kinerja), atau pengelolaan entitas atau proses ekonomi. Pada tahun 2021 presentase rasio efektifitas sebesar 98,33%, pada tahun 2022 sebesar 100,04%, dan pada tahun 2023 sebesar 79,07%. Rata-rata rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 hingga 2023 adalah sebesar 224,73% yang melebihi 100% sehingga tingkat rasio efektifitas terhadap Pendapatan Asli Daerah dianggap sangat efektif, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan PAD sebaik mungkin, termasuk pembayaran, pajak, hasil pengelolaan investasi tertentu, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Akan tetapi, seperti yang kita lihat dari tabel diatas, bahwa pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 79,07%, sehingga memungkinkan terdapat beberapa faktor penyebab dari penurunan tersebut, seperti adanya kebijakan atau strategi yang tidak tepat dan kurang efektif, terjadinya gangguan operasional atau adanya faktor peristiwa yang memengaruhi kinerja, perubahan metode pengukuran atau perhitungan koefisien efektifitas dari masa ke masa yang dapat mempengaruhi perubahan angka tersebut, dan adanya faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, peraturan baru, serta meningkatnya persaingan juga dapat memengaruhi kinerja dan mengurangi efektifitas.

Tabel 8. Perhitungan Rasio Efektivitas Daerah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase
2021	Rp 603.794.666.883,32	Rp 614.067.445.482,00	98,33%
2022	Rp 718.337.240.633,10	Rp 718.028.603.480,00	100,04%
2023	Rp 792.120.013.218,17	Rp 1.001.792.007.861,00	79,07%

Rasio Efisiensi

Menurut Davis, M. dan Davis, L. (2019), Efisiensi anggaran adalah seberapa baik suatu organisasi atau komunitas menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling rendah. Sedangkan, menurut Susskind (2020), efisiensi anggaran dapat didefinisikan sebagai sejauh mana unit atau organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalkan pemborosan sumber daya atau biaya yang tidak perlu. Dari tahun 2021 hingga 2023, rasio efisiensi pemerintah Kota Malang meningkat dari 103,42% menjadi 110,74%. Pada tahun 2021, rasio ini sebesar 103,42%, pada tahun 2022 sebesar 100,76%, dan pada tahun 2023 sebesar 110,74%.

Kriteria tingkat efisiensi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 termasuk golongan tidak efisiensi. Perhitungan rata-rata tingkat keefisiensian pemerintah Kota Malang sebesar 241,10%, ini menunjukkan tingkat presentase tersebut melebihi angka 100% yang termasuk golongan tidak efisiensi yang memungkinkan bahwa pemerintah Kota Malang perlu adanya upaya untuk meminimalkan pemborosan, memaksimalkan penggunaan uang, serta meningkatkan efisiensi organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif.

Tabel 9. Perhitungan Rasio Efisiensi Daerah Kota Malang
Tahun Anggaran 2021 – 2023

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase
2021	Rp 2.225.952.718.513,56	Rp 2.152.355.838.252,87	103,42%
2022	Rp 2.188.318.745.870,33	Rp 2.171.753.404.373,60	100,76%
2023	Rp 2.596.706.284.209,93	Rp 2.344.815.945.277,81	110,74%

KESIMPULAN DAN SARAN

Kami dapat mengatakan dari hasil penelitian kami bahwa: Analisis Varians Pendapatan pada tahun 2021 - 2023 mengalami pendapatan fluktuatif. Untuk tahun 2021 dan 2022 terdapat selisih bersaldo negatif, dan pada tahun 2023 terdapat selisih bersaldo positif. Analisis Derajat Desentralisasi terus mengalami peningkatan yang signifikan, mulai dari tahun 2021 – 2023 dari 28,05% menjadi 33,78%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang semakin melakukan desentralisasi keputusan dan wewenang ke tingkat yang lebih rendah selama periode tersebut. Rasio ketergantungan keuangan daerah terus menurun antara tahun 2021-2023 dari 68,55% menjadi 66,22%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan sebuah wilayah terhadap suatu pihak semakin rendah. Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah dibandingkan antara tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 98,33% menjadi 79,07% yang menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam operasi (kinerja), atau pengelolaan entitas atau proses ekonomi. Rasio efisiensi mengalami kenaikan. Mulai tahun 2021 - 2023 naik dari 103,42% menjadi 110,74%. Tetapi kenaikan tersebut menunjukkan golongan tidak efisien karena rata rata keefsiensian pemerintah kota Malang sebesar 241,10%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk meminimalkan pemborosan, memaksimalkan penggunaan uang, serta meningkatkan efisiensi organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, F., Rahmawati, A. D., Astutik, I. W., & ... (2024). Analisis Prosedur Dokumen Alokasi Anggaran Dalam Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik. *Gudang Jurnal* ..., 2, 46–48. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/view/289%0Ahttps://gudangjurnal.com/index.php/gjpm/article/download/289/282>
- Amanda Program Studi D-, R., Manajemen Pemerintahan, A., Negeri Bandung, P., & Akuntansi, J. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung Khozin Arief Jouzar Farouq Ishak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs->

3.1.2/iarj/article/view/3389/2483

- Ani, L., Mulyadi, J., & Prutowo, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dengan Perencanaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kota Depok Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekobisman*, 5(1), 1–16.
- Arini, A., & Erliana, R. (2023). Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada Kinerja Keuangan Daerah. ... : *Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & ...*, 4(2), 174–183.
<http://www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/3894%0Ahttp://www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/viewFile/3894/1697>
- Baviga, R. (2022). Pengaruh Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(2), 173–194.
<https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.35>
- Bulo, Y., & Deviyanti, D. R. (2020). Analisis Rasio Keuangan Pada Laporan Realisasi Anggaran Di Pemerintah Daerah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman ...*, 1, 1–14. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/5029>
- Erik Setiawan. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(2), 582.
- Fredrik Tuju, E., Manossoh, H., & N Wokas, H. R. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 185–196.
- Handini, Sri. (2020). *Buku Ajar: Manajemen Keuangan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kawatu, Samuel Freddy. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Depublish.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(69), 1422–1441.
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sekor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25).
http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx
- MRizky, A. (2020). 済無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Rahmawati, F., & Susanto, A. A. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018-2022. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 202–208.
<https://doi.org/10.31294/eco.v7i2.16080>
- Ruliaty, Badollahi, I., & Nurfadillah, A. I. (2019). Ruliaty_Garuda2409745. *Jurnal Ekonomi*

Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 1(1), 40–66.

Shaladin Hernandi, D. A., Deviyanti, D. R., & Ratna Sari, W. I. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur. *JIAM (Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman)*, 7(2), 1–12. [http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/78/1/BAB 1-V.pdf](http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/78/1/BAB%201-V.pdf)

Sitepu, H. V, Slamet, B., Putri, F. C., Antoni, E., Silviana, S., & ... (2024). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik* (Issue February). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JJzuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA96&dq=anggaran+pendapatan+belanja+daerah+untuk+pembiayaan+baznas&ots=M2aWdPG1Ff&sig=a9_z7I22W9AEft2zMCL-h24lBPc